

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, manajemen adalah kerangka kerja atau proses yang mencakup pengelolaan dan pembimbingan anggota organisasi agar mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Manajemen

Kata dasar manajemen adalah "mengelola," yang berarti mengatur atau mengendalikan. Singkatnya, manajemen adalah proses di mana suatu perusahaan bekerja untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen adalah untuk membantu pekerjaan dan implementasi, serta untuk membagi tanggung jawab sesuai dengan kekuatan masing-masing karyawan di perusahaan. Selain itu, pelaksanaan fungsi manajemen yang saling bergantung memungkinkan pengembangan manajemen yang paling efisien (Armansyah, 2020).

Kepemimpinan adalah membimbing sekelompok orang menuju tujuan yang telah ditentukan melalui perencanaan strategis, analisis organisasi, perumusan tujuan, dan pengawasan langsung. Dalam arti yang lebih luas, manajemen didefinisikan sebagai "seni dan ilmu mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur aliran sumber daya organisasi menuju pencapaian tujuannya" (Sani, 2022).

b. Fungsi Manajemen

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien merupakan tujuan akhir dari fungsi manajemen, yang mencakup sejumlah langkah untuk merencanakan dan memimpin seluruh operasi organisasi.

1) *Planning*

Asumsi tentang masa depan, serta proses pemilihan dan penghubungan berbagai data, merupakan komponen penting dari perencanaan. Menurut Putri (2025), metode ini digunakan untuk menciptakan dan menguraikan berbagai langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

2) *Organizing*

Untuk mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian mencakup identifikasi, pengkategorian, dan pengurutan berbagai operasi yang dibutuhkan. Selain itu, pengorganisasian mencakup pendelegasian tanggung jawab dan wewenang kepada individu sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai, dan alokasi sumber daya manusia untuk setiap aktivitas (Muslikhah, 2024). Pengorganisasian pada dasarnya merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungan yang dihadapi, sehingga setiap anggota organisasi memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Muslikhah, 2024). Dalam konteks lembaga yang masih dikelola secara kekeluargaan, pengorganisasian menjadi unsur penting karena ketidakjelasan struktur dan pembagian tugas dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan sehari-hari.

3) *Actuating*

Tujuan mobilisasi adalah untuk membangkitkan dan menginspirasi seluruh organisasi untuk mengejar tujuan-tujuannya dengan sangat serius. Persiapan dan pelaksanaan proses ini oleh kepemimpinan memastikan bahwa setiap langkah dapat diambil dengan tepat dan efisien (Hendri & Armansyah, 2022).

4) *Controlling*

Standar atau tujuan ditetapkan, aktivitas dipantau, dan hasil dievaluasi sebagai bagian dari proses supervisi. Prosedur ini diikuti

untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki masalah dan menjaga agar semuanya berjalan lancar sesuai rencana (Murtisaputra dkk., 2024). Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada pada arah yang telah direncanakan, sekaligus menjadi sarana untuk mendeteksi secara dini penyimpangan atau kendala yang terjadi di lapangan (Murtisaputra dkk., 2024). Pada lembaga seperti museum, pengawasan menjadi sangat penting terutama dalam menjaga keamanan, kelengkapan, dan kondisi koleksi, karena lemahnya pengawasan dapat berdampak langsung pada hilang atau rusaknya benda-benda bersejarah yang sulit digantikan.

c. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen menurut Yurianto (2022) yaitu:

1) Manusia (*Man*)

Sumber daya manusia adalah aset utama yang dimiliki setiap manajemen untuk mencapai tujuan mereka. Manajer tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa individu. Ketika orang lain bekerja untuk mencapai suatu tujuan, pada akhirnya orang-oranglah yang mendapatkan manfaatnya.

2) Metode (*methods*)

Ada banyak pendekatan berbeda yang dapat digunakan orang ketika mereka ingin menyelesaikan sesuatu dengan baik. Akibatnya, teknik adalah sarana untuk mencapai tujuan.

3). Bahan-bahan (*material*)

Agar proses manufaktur berjalan lancar, material merupakan komponen pendukung yang penting. Produksi akan terhenti jika tidak ada material.

3) Pasar (*market*)

Pasar adalah alat manajemen yang sama pentingnya. Tidak akan ada gunanya memproduksi sesuatu jika tidak ada pasar untuk membelinya.

4) Mesin (*machine*)

Dengan kemajuan teknologi, penggunaan mesin-mesin sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

5) Uang (*money*)

Untuk melakukan berbagai aktivitas perusahaan diperlukan uang. Uang yang digunakan untuk membayar upah atau gaji, membeli bahan-bahan, dan peralatan.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola, yaitu individu yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengelolaan. Pengelolaan merupakan suatu proses yang memiliki peran penting dalam penetapan tujuan, sekaligus mencakup upaya pengendalian terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan serta pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan tidak hanya berfokus pada tahapan perencanaan, tetapi juga melibatkan pelaksanaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan selalu berkaitan dengan aktivitas sumber daya manusia di dalam suatu kantor, lembaga, atau organisasi, sehingga mencakup seluruh unsur yang ada seperti administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana, serta bidang keuangan, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek organisasi lainnya. Dalam konteks permuseuman, pengelolaan museum dipahami sebagai suatu proses terpadu yang mencakup kegiatan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang disusun secara sistematis dan terstruktur (Nasution, 2021).

Pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan serta melakukan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif. Proses pengelolaan tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, karena manusia menjadi unsur utama dalam menjalankan kegiatan organisasi (Rahayu, 2020).

b. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja sama dan peran orang lain. Pengelolaan dipahami sebagai proses pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada individu yang terorganisasi dalam suatu kelompok formal agar tujuan bersama dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan memiliki fungsi-fungsi utama yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi secara keseluruhan (Rahayu, 2020).

c. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah mengarahkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun sarana dan prasarana, agar dapat dimanfaatkan secara efisien sehingga mampu mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan materi dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui pengelolaan yang baik, organisasi dapat menjalankan kinerja sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, menciptakan keseimbangan antara berbagai tujuan dan kepentingan yang berbeda, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Pencapaian tujuan pengelolaan dapat terwujud apabila setiap tahapan manajemen dilaksanakan secara tepat dan sistematis, mulai dari penentuan strategi, menentukan sarana dan tanggung jawab, merumuskan tujuan dan standar kerja, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan berfungsi sebagai upaya mendukung organisasi dalam menjaga keseimbangan tujuan serta mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien (Putri, 2025).

3. Pengertian Museum

Museum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Klasik, yaitu "muze", yang merujuk pada kumpulan sembilan dewi sebagai lambang ilmu pengetahuan dan kesenian. Secara istilah, museum dapat dipahami sebagai suatu tempat atau lembaga yang mengumpulkan, memamerkan, dan menyimpan benda-benda yang dapat menjadi sumber pengetahuan, seperti benda bersejarah, karya seni, maupun benda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.

International Council of Museums (ICOM), sebagaimana dikutip dalam Chatulistiwa dkk. (2024), mendefinisikan museum secara lebih luas sebagai "a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment". Definisi ini menegaskan bahwa museum bukan sekadar tempat penyimpanan benda-benda lama, melainkan sebuah lembaga nirlaba permanen yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan pengembangannya, yang secara aktif melakukan kegiatan akuisisi, konservasi, penelitian, komunikasi, serta pameran terhadap warisan budaya, baik yang bersifat kebendaan (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible).

Fungsi museum dari masa ke masa terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan zaman, tetapi hakikat pengertian museum itu sendiri tidak banyak berubah (Chatulistiwa dkk., 2024). Pada

awalnya, museum lebih banyak difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan pameran benda-benda bersejarah semata, namun seiring berjalannya waktu, museum berkembang menjadi pusat pembelajaran, sarana edukasi, serta destinasi wisata sejarah dan budaya yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa museum merupakan lembaga yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai tempat pelestarian warisan sejarah dan budaya, sekaligus sebagai sarana edukasi dan wisata bagi masyarakat luas. Dalam konteks penelitian ini, Museum Jenderal Abdul Haris Nasution berperan sebagai lembaga yang melestarikan sejarah perjuangan tokoh nasional, sekaligus menjadi destinasi wisata sejarah yang memberdayakan masyarakat sekitar.

4. Indikator peningkatan Museum

a. Peningkatan Jumlah Pengunjung

Peningkatan jumlah pengunjung merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan museum. Indikator ini menunjukkan tingkat daya tarik museum terhadap masyarakat. Semakin tinggi jumlah pengunjung, maka semakin besar pula minat masyarakat terhadap museum. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan harian, bulanan, maupun tahunan, serta keterlibatan pengunjung dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, dan wisatawan.

Peningkatan jumlah pengunjung merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan museum dalam menarik minat masyarakat. Penggunaan teknologi digital dan strategi akses yang tepat terbukti dapat meningkatkan jumlah kunjungan museum. pemanfaatan teknologi seperti media digital, penyajian informasi yang interaktif, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat dapat meningkatkan ketertarikan pengunjung untuk datang ke museum. (Saputra, 2024).

b. Peningkatan kualitas Pelayanan Museum

Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pengunjung museum. Pelayanan yang baik ditunjukkan melalui

sikap ramah, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta profesionalisme pemandu dalam melayani pengunjung.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemandu museum memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan kepuasan pengunjung. Pelayanan yang baik akan menciptakan kesan positif serta meningkatkan minat kunjungan ulang wisatawan terhadap museum (Nurisnaini et al., 2020). Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemandu museum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengunjung (Saputra et al., 2022).

c. Pengelolaan Koleksi Museum

Pengelolaan koleksi museum merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan suatu museum. Koleksi yang dimiliki perlu dikelola secara sistematis melalui proses pencatatan, penyimpanan, perawatan, hingga penyajian kepada pengunjung. Pengelolaan yang baik akan memudahkan pengunjung dalam memahami informasi yang disampaikan serta menjaga keaslian dan kelestarian koleksi. Selain itu, penataan koleksi yang menarik dan informatif juga dapat meningkatkan daya tarik museum sehingga pengunjung lebih tertarik untuk mempelajari isi museum secara mendalam.

pengelolaan koleksi museum harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan melalui proses pengelolaan, penyimpanan, serta dokumentasi yang tepat. Pengelolaan yang optimal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan koleksi, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman edukatif bagi pengunjung melalui penyajian pameran dan program yang menarik (Nurwana et al., 2024).

Dengan demikian, tata kelola koleksi yang baik akan mendukung peningkatan kualitas museum serta memperkuat perannya sebagai lembaga pelestarian budaya.

d. Peningkatan Program dan Kegiatan Museum

Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang dapat

meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Museum memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai sejarah dan budaya kepada masyarakat melalui penyajian koleksi yang informatif dan edukatif. Melalui berbagai program edukasi, seperti pameran dan kegiatan pembelajaran, museum mampu memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada pengunjung. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan budaya. Dengan demikian, fungsi edukatif museum menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung serta memperkuat peran museum sebagai lembaga pelestarian budaya (Batubara & Maulida, 2024).

e. Peningkatan Promosi Museum

Promosi museum perlu dilakukan melalui strategi komunikasi yang tepat dan beragam agar mampu meningkatkan minat kunjungan masyarakat.

Strategi promosi memiliki peran penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi museum. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti periklanan, penjualan langsung, hubungan masyarakat, serta pemanfaatan media sosial. Penggunaan media digital, khususnya media sosial seperti Instagram, terbukti efektif dalam menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan jumlah kunjungan museum (Yudaninggar et al., 2023).

f. Peningkatan Kerja Sama Museum

Kerja sama dan kemitraan menjadi faktor penting dalam pengembangan museum, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas publik dapat memperkuat peran museum sebagai lembaga edukasi dan pelestarian budaya.

Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan komunitas memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan museum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan museum.

Kolaborasi yang terjalin tidak hanya memperkuat fungsi museum sebagai lembaga pelestarian budaya, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program yang diselenggarakan. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan komunitas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan museum melalui dukungan sumber daya, pertukaran informasi, serta pengembangan program yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Utama, 2024).

5. Pengorganisasian dan Pengawasan Museum

a. Pengertian Pengorganisasian dan Pengawasan Museum

Pengorganisasian dan pengawasan museum merupakan bagian dari proses manajemen yang secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas museum guna mencapai tujuan pelestarian, edukasi, dan rekreasi budaya. Pengorganisasian museum berkaitan dengan penyusunan struktur kepengurusan dan pembagian tugas yang jelas, sementara pengawasan berkaitan dengan upaya menjaga agar koleksi dan kegiatan museum tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur dan profesional. Dalam konteks ini, pengorganisasian dan pengawasan museum mencakup berbagai aspek mulai dari pembagian tugas pengurus, pengelolaan koleksi, sumber daya manusia, hingga pelayanan kepada publik agar nilai-nilai sejarah dan budaya dapat tersampaikan secara optimal (Helmi, 2019).

Pengorganisasian dan pengawasan museum juga berkaitan dengan upaya menjadikan museum sebagai pusat pembelajaran dan destinasi wisata budaya. Pengorganisasian yang tertata dan pengawasan yang konsisten akan mampu meningkatkan daya tarik museum sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa museum memerlukan struktur pengorganisasian dan mekanisme

pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman agar tetap relevan dan diminati oleh generasi modern (Manalu et al., 2025).

Terkait dengan karakteristik pengelolaan museum yang bersifat kekeluargaan, konsep organisasi keluarga (family business) dapat digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Rovelli dkk. (2021) mengemukakan bahwa suatu organisasi dapat digolongkan sebagai organisasi keluarga apabila melibatkan sedikitnya dua anggota keluarga yang saling memengaruhi arah organisasi melalui hubungan kekerabatan, peran manajemen, maupun hak kepemilikan. Dalam organisasi keluarga, hubungan personal dan kepercayaan antaranggota menjadi dasar utama pengambilan keputusan, menggantikan mekanisme birokrasi formal yang biasa ditemukan pada organisasi modern. Karakteristik inilah yang tampak pada pengelolaan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution, di mana seluruh pengurus memiliki hubungan kekerabatan dan menjalankan tugas berdasarkan kepercayaan keluarga besar, bukan berdasarkan struktur organisasi formal yang tertulis.

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Museum

Pengelolaan museum harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Prinsip profesionalisme menuntut pengelola museum untuk memiliki kompetensi dalam bidang permuseuman, termasuk dalam hal konservasi, dokumentasi, dan interpretasi koleksi. Selain itu, akuntabilitas diperlukan agar pengelolaan museum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama dalam hal pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai tinggi (Sutaarga, 2019).

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan museum menekankan pentingnya menjaga kelangsungan fungsi museum dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan koleksi yang baik, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan program edukasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, museum tidak hanya berfungsi untuk masa kini, tetapi juga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi

mendatang sebagai sumber pengetahuan dan identitas budaya (Sucilawati & Sujana, 2024).

c. Pengelolaan Koleksi Museum

Koleksi merupakan inti dari sebuah museum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis dan sesuai standar. Pengelolaan koleksi mencakup kegiatan inventarisasi, dokumentasi, konservasi, dan penyajian koleksi kepada publik. Proses ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan nilai historis benda koleksi agar tetap terjaga dalam jangka panjang (Nurwana et al., 2024).

Selain itu, pengelolaan koleksi juga harus memperhatikan aspek edukasi, di mana setiap koleksi yang dipamerkan harus memiliki informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengunjung. Penyajian koleksi yang menarik dan informatif akan meningkatkan pengalaman belajar pengunjung serta memperkuat fungsi museum sebagai sarana edukasi publik (Purwati et al., 2025).

d. Fungsi Pengorganisasian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Museum

Fungsi manajemen dalam pengelolaan museum secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, namun penelitian ini secara khusus menyoroti fungsi pengorganisasian dan pengawasan. Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus, agar dapat bekerja secara efektif, sementara pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan koleksi museum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Helmi, 2019).

Penerapan fungsi pengorganisasian dan pengawasan yang baik akan membantu museum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu pelestarian dan penyebaran nilai budaya. Selain itu, kedua fungsi tersebut juga berperan dalam menjaga keamanan koleksi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung, sehingga museum dapat memberikan pengalaman yang edukatif dan menyenangkan (Manalu et al., 2025).

e. Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Museum

Selain menghadapi berbagai tantangan, pengelolaan museum juga memiliki sejumlah faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengorganisasian dan pengawasan. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya, yang turut berkontribusi dalam penyediaan sumber daya maupun pengembangan program museum (Sutaarga, 2019).

Faktor pendukung lainnya adalah nilai historis dan keunikan objek yang dimiliki museum, yang menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun pelajar. Potensi ini, apabila dikelola dengan pengorganisasian yang tertata dan pengawasan yang konsisten, dapat meningkatkan kunjungan sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya (Manalu et al., 2025). Selain itu, ketersediaan teknologi informasi turut menjadi faktor pendukung, karena dapat dimanfaatkan pengelola untuk mempermudah dokumentasi koleksi serta memperluas jangkauan promosi museum kepada masyarakat luas (Purwati et al., 2025).

f. Tantangan dalam Pengelolaan Museum

Pengelolaan museum menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendanaan, serta rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum. Tantangan ini dapat menghambat upaya pelestarian dan pengembangan museum sebagai institusi budaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang inovatif dan kreatif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut (Sucilawati & Sujana, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi museum. Pengelola museum dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan dan penyajian koleksi, seperti melalui digitalisasi koleksi dan penggunaan media interaktif. Dengan

demikian, museum dapat menjangkau lebih banyak pengunjung dan meningkatkan daya tariknya di era digital (Purwati et al., 2025).

g. Upaya Optimalisasi Pengelolaan Museum

Optimalisasi pengelolaan museum dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan program edukasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pengelola museum perlu memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Selain itu, program edukasi yang inovatif dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi museum (Nurwana et al., 2024).

Upaya optimalisasi juga dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan museum, baik dalam bentuk pendanaan maupun pengembangan program. Dengan demikian, museum dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya (Sutaarga, 2019).

6. Jenderal Abdul Haris Nasution dalam Konteks Museum

Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan serta perkembangan militer nasional. Nilai perjuangan dan pemikiran yang dimilikinya menjadikan tokoh ini memiliki signifikansi historis yang tinggi untuk dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa (Burhanuddin, 2024).

Museum yang didedikasikan untuk tokoh ini berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan, merawat, dan memperkenalkan peninggalan sejarah kepada masyarakat. Museum tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai lembaga edukasi yang memiliki fungsi pelestarian dan penyebaran nilai budaya (Helmi, 2019).

Selain itu, pengelolaan museum yang baik menuntut adanya sistem yang terstruktur dalam pengelolaan koleksi, penyajian informasi, serta

pelayanan kepada pengunjung. Pengelolaan koleksi yang dilakukan secara sistematis melalui proses inventarisasi, dokumentasi, dan konservasi akan mendukung keberlanjutan fungsi museum sebagai lembaga pelestarian budaya (Nurwana et al., 2024).

Dalam konteks ini, keberadaan tokoh sejarah dalam museum menjadi penting karena dapat memperkuat nilai edukatif dan daya tarik museum bagi masyarakat. Prinsip pengelolaan museum yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan juga diperlukan agar museum dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sarana pendidikan dan pelestarian sejarah (Sucilawati & Sujana, 2024).

Pengelolaan museum tidak terlepas dari penerapan fungsi pengorganisasian dan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan museum (Sutaarga, 2019). Dengan demikian, keberadaan Jenderal Abdul Haris Nasution tidak hanya menjadi latar belakang berdirinya museum, tetapi juga menjadi dasar dalam pengelolaan museum yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi edukasi, pelestarian sejarah, serta daya tarik museum bagi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juairiah (2022) dengan judul “Manajemen Koleksi Museum dan Problematikanya di Era New Normal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan museum masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek perencanaan dan pengorganisasian koleksi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya sistem manajemen yang diterapkan. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai aspek manajemen dalam pengelolaan museum. Namun, penelitian Juairiah lebih berfokus pada manajemen koleksi museum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada manajemen pengelolaan museum secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen POAC.

<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/BIP/article/view/4290>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mujiono et al. (2024) dengan judul “Pengelolaan Koleksi Museum Zoologicum Bogoriense (MZB)”. Penelitian ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, koordinasi antarbagian, serta sistem pengelolaan yang terintegrasi dalam mendukung keberlangsungan museum sebagai lembaga nasional. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan museum dari sisi manajerial. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian, di mana Mujiono et al. meneliti museum berbasis sains dengan sistem kelembagaan yang sudah formal, sedangkan penelitian ini mengkaji museum tokoh sejarah dengan karakteristik pengelolaan yang lebih bersifat lokal.
https://ejournal.brin.go.id/berita_biologi/article/view/892
3. Penelitian yang dilakukan oleh Innani dkk. (2025) dengan judul “Pengelolaan Museum Perjuangan TNI: Sistem Non-Digital untuk Pelestarian Koleksi Sejarah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan museum masih dilakukan secara manual, dengan pengawasan koleksi dilakukan oleh sembilan personel dari unit yang berbeda, serta pemeliharaan dan penilaian rutin terhadap koleksi seperti dokumen sejarah dan senjata. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi langsung dan wawancara, serta fokus pada pengelolaan museum yang belum terdigitalisasi. Namun, penelitian Innani dkk. dilakukan pada museum yang dikelola oleh institusi militer dengan personel pengawas yang relatif banyak, sedangkan penelitian ini mengkaji pengelolaan museum tokoh sejarah yang bersifat kekeluargaan dan hanya dikelola oleh sedikit orang.

<https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/2975>

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menekankan pentingnya penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan museum, baik dari aspek koleksi, kelembagaan, maupun pariwisata. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada museum yang telah memiliki sistem organisasi formal dan dikelola secara profesional.

Sementara itu, kajian mengenai pengelolaan museum yang memiliki karakteristik khusus, seperti pengelolaan yang melibatkan unsur kekeluargaan atau berbasis historis lokal, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara lebih mendalam penerapan fungsi manajemen POAC pada Museum Jenderal Abdul Haris Nasution, yang memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dibandingkan dengan museum pada umumnya. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menekankan pentingnya penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan museum, baik dari aspek koleksi, kelembagaan, maupun pariwisata. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada museum yang telah memiliki sistem organisasi formal dan dikelola secara profesional.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan fungsi manajemen POAC dalam pengelolaan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution serta mengidentifikasi strategi pengembangan yang dapat meningkatkan peran museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji pengelolaan museum berbasis lokal yang belum memiliki sistem manajemen formal seperti museum pada umumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen yang diperoleh dalam konteks alamiah, dengan peneliti sebagai instrument utama penelitian (Malahati et al, 2023).

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta realitas sosial yang terjadi di lapangan secara utuh dan kontekstual, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Waruwu, 2023).

Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini menekankan pemaparan fenomena secara sistematis, factual, dan akurat (Abdullah, 2024).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di museum Jenderal Abdul Haris Nasution yang berlokasi di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa museum tersebut merupakan museum tokoh nasional yang memiliki nilai historis tinggi serta sistem pengelolaan yang khas, sehingga relevan dengan fokus manajemen POAC.

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sampai selesai, yang meliputi tahapan pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian	Tahun 2025-Tahun 2026										
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
1.	Observasi	√										
2.	Pembuatan proposal skripsi	√	√	√	√	√						
3.	Bimbingan proposal						√	√				
4.	Seminar proposal								√			
5.	Perbaikan proposal								√			
6.	Penelitian									√	√	
7.	Penulisan hasil penelitian									√	√	
8.	Bimbingan skripsi									√	√	√
9.	Sidang Munaqasah											√

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu agar diperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2023).

Objek penelitian ini adalah penerapan fungsi pengorganisasian dan pengawasan (*Organizing* dan *Controlling*) dalam pengelolaan museum Jendral Abdul Haris Nasution.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian ini adalah bapak Yusuf

sebagai pengelola atau pengurus Museum Jenderal Abdul Haris Nasution. Data primer ini digunakan untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian dan pengawasan dalam pengelolaan museum, faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi pengelola dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Bapak Sahruli Nasution selaku ketua pengurus museum yang mewakili pihak keluarga (wawancara dilakukan melalui sambungan telepon), Bapak Mukhtar Nasution selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, serta masyarakat sekitar museum, guna memperoleh data yang lebih lengkap dan dapat dibandingkan dari berbagai sudut pandang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, arsip serta panel informasi yang ada dalam museum jenderal Abdul Haris Nasution. Data ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif (Tracy, 2020).

1. Observasi

Observasi non-partisipan digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan museum tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan tersebut. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pengorganisasian dan pengawasan dalam pengelolaan museum (Sugiyono, 2023).

2. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dengan tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan fleksibel sesuai dengan pengalaman informan (Abdullah, 2024).

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui pengumpulan dokumen tertulis, foto, arsip, dan laporan kegiatan yang relevan dengan penelitian (Malahati et al., 2023).

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Sugiyono, 2023). Untuk menguji keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu di luar data itu sendiri sebagai bahan perbandingan terhadap data yang telah diperoleh. Teknik triangulasi dipilih karena mampu menguji kredibilitas data secara komprehensif tanpa memerlukan instrumen pengukuran statistik, sehingga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, kemudian membandingkan dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi dari Bapak Yusuf selaku penjaga museum (wawancara langsung), Bapak Sahruli Nasution selaku ketua pengurus yang mewakili pihak keluarga (wawancara melalui telepon), Bapak Mukhtar Nasution selaku Kepala Bidang Dinas Pariwisata (wawancara langsung), serta masyarakat sekitar (wawancara langsung), untuk melihat kesesuaian informasi mengenai pengorganisasian dan pengawasan museum dari empat sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak pelaksana harian, pihak keluarga pengurus, pihak pemerintah, dan masyarakat sekitar.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, Bapak Mukhtar Nasution, dan masyarakat sekitar yang dilakukan secara langsung, maupun dengan Bapak Sahruli Nasution yang dilakukan melalui telepon, dibandingkan dengan hasil observasi langsung di lokasi (struktur kepengurusan, kondisi koleksi) serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan buku tamu pengunjung, sebagaimana ditampilkan pada Bab IV. Kesesuaian antara pernyataan informan dan temuan observasi maupun dokumentasi tersebut memperkuat kredibilitas data yang diperoleh. Apabila terdapat perbedaan hasil antara teknik-teknik tersebut, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait guna memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkaitan dengan waktu pengumpulan data yang dapat memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara pada pagi hari, saat informan masih segar dan belum banyak aktivitas, umumnya akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data pada waktu dan situasi yang berbeda, misalnya pada hari kerja maupun akhir pekan serta pada jam kunjungan museum yang berbeda, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kondisi situasional tertentu.

Melalui ketiga teknik triangulasi tersebut, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif berdasarkan sudut pandang peneliti semata, melainkan telah teruji melalui perbandingan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data (Sugiyono, 2023).

G. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap yang berlangsung secara terus-menerus, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengawasan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disederhanakan tanpa menghilangkan makna aslinya, sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan fokus penelitian.

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, yaitu dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun gambar agar lebih mudah dipahami. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh serta hubungan antara satu data dengan data lainnya, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan pada tahap berikutnya.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara dan akan terus diverifikasi dengan data-data baru yang diperoleh di lapangan, sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan benar-benar didukung oleh bukti yang valid dan konsisten dengan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian.

Melalui tahapan analisis data tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diolah secara sistematis, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengorganisasian dan pengawasan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Temuan Umum Penelitian

a. Gambaran Umum Museum Jenderal Abdul Haris Nasution

Museum Jenderal Abdul Haris Nasution terletak di Desa Hutapungkut Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Museum ini berdiri sebagai bangunan tersendiri, dengan rumah peninggalan Jenderal Abdul Haris Nasution yang berada tepat di bagian samping museum dan tetap dipertahankan keasliannya sebagai bukti sejarah dan warisan keluarga.

Sebelum difungsikan sebagai museum, bangunan ini telah berdiri sejak tahun 1990 dengan nama Rumah Perkumpulan Keluarga, yang pada masa itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar Abdul Haris Nasution. Berdasarkan hasil wawancara, perubahan fungsi bangunan dari Rumah Perkumpulan Keluarga menjadi museum dilatarbelakangi oleh tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan keluarga besar untuk mengenang dan melestarikan jasa serta perjuangan Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai putra daerah yang menjadi kebanggaan Kotanopan. Kesadaran tersebut mendorong pihak keluarga untuk secara bertahap mengumpulkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan perjalanan hidup dan karier Jenderal Abdul Haris Nasution, baik berupa buku, foto, maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap memiliki nilai sejarah.

Proses pengumpulan koleksi tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme formal atau terlembaga, melainkan berlangsung secara alami sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab moral keluarga terhadap warisan sejarah leluhur mereka sendiri. Dengan semakin bertambahnya koleksi yang terkumpul, keluarga kemudian berinisiatif mengembangkan Rumah Perkumpulan Keluarga menjadi sebuah museum yang lebih representatif, sehingga nilai-nilai sejarah dan perjuangan Jenderal Abdul Haris Nasution dapat diwariskan dan diakses secara lebih luas, tidak hanya

oleh kalangan keluarga, tetapi juga oleh masyarakat umum. Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap nilai sejarah yang terkandung di dalamnya, bangunan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah museum. Pembangunan museum dimulai pada tahun 2001 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 4 April 2002. Dalam perkembangan selanjutnya, museum ini mengalami perubahan nama menjadi Rumah Literasi Jenderal Abdul Haris Nasution, sebagai penyesuaian terhadap fungsi barunya yang tidak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi juga sebagai sarana literasi bagi masyarakat.

Informasi mengenai sejarah pembangunan museum tersebut juga diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat setempat. Keterangan yang disampaikan sejalan dengan penuturan penjaga museum, yakni bahwa proses pembangunan museum dimulai pada tahun 2001 dan diresmikan pada tahun 2002. Kesesuaian informasi dari kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa data mengenai sejarah berdirinya museum dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses peresmian museum ini berlangsung secara sederhana dan tidak disertai dengan penandatanganan dokumen atau berkas peresmian secara resmi. Peresmian dilakukan dalam bentuk seremoni sederhana yang ditandai dengan pembukaan tirai penutup papan nama museum, dan didokumentasikan melalui foto bersama antara pihak-pihak yang hadir. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Perpustakaan, serta Wakil Bupati Mandailing Natal, sebagai bentuk dukungan dan pengakuan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan museum ini.



Gambar 4.1 Dokumentasi Peresmian Rumah Literasi Jenderal Besar A.H. Nasution

Ketiadaan dokumen resmi yang ditandatangani dalam proses peresmian tersebut turut memperkuat gambaran bahwa pengelolaan museum ini secara administratif masih bersifat sederhana, sejalan dengan temuan lain dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa berbagai aspek pengelolaan, termasuk struktur kepengurusan, lebih banyak berjalan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antarpihak dibandingkan dengan mekanisme administratif yang baku dan terdokumentasi secara resmi.

Proses pembangunan museum ini tidak terlepas dari peran serta Ikatan Pemuda Hutapungkut, sebuah organisasi kepemudaan setempat yang turut berkontribusi dalam mendukung terwujudnya pembangunan museum. Organisasi ini berperan aktif memperkenalkan kondisi rumah peninggalan Jenderal Abdul Haris Nasution kepada masyarakat luas melalui media sosial, sehingga menarik perhatian berbagai pihak terhadap pentingnya melestarikan bangunan bersejarah tersebut. Upaya ini pada

akhirnya turut mendorong dan mendukung proses pembangunan museum hingga dapat diresmikan dan difungsikan sebagaimana adanya saat ini.

Pendirian museum ini bertujuan untuk mengenang jasa dan perjuangan Jenderal Abdul Haris Nasution, melestarikan peninggalan sejarah keluarga dan bangsa, serta menjadi sarana edukasi dan literasi bagi masyarakat, pelajar, dan peneliti yang ingin mempelajari lebih dalam perjalanan hidup dan kiprah salah satu tokoh militer nasional tersebut.



Gambar 4.2 Tampak Depan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution (Rumah Literasi Jenderal Besar A.H. Nasution)

b. Letak Geografis Museum Jenderal Abdul Haris Nasution

Museum Jenderal Abdul Haris Nasution terletak di Desa Hutapungkut Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Secara administratif, wilayah desa tersebut berbatasan dengan Desa Manambin di sebelah utara, Desa Hutarimbaru Ulupungkut di sebelah timur, Kelurahan Tamiang di sebelah selatan, dan Desa Hutapungkut Tonga di sebelah barat.

Akses menuju museum telah dilengkapi dengan papan penunjuk arah yang terpasang di tepi jalan utama, sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan lokasi museum. Selain

itu, terdapat pula gapura sebagai penanda pintu masuk kawasan menuju museum, yang semakin memperjelas batas wilayah objek wisata sejarah tersebut. Letak museum yang berada di kawasan Desa Hutapungkut Jae ini menjadikannya mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung dari luar daerah, mengingat posisinya yang strategis di antara desa-desa yang saling berdekatan di Kecamatan Kotanopan.



Gambar 4.3 Papan Penunjuk Arah Menuju Museum Jenderal Abdul Haris Nasution

c. Jam Operasional dan Fasilitas Museum

Museum Jenderal Abdul Haris Nasution dibuka setiap hari untuk menerima pengunjung, baik yang datang secara perorangan maupun rombongan dari berbagai instansi. Keterbukaan akses setiap hari ini memudahkan masyarakat, pelajar, maupun peneliti yang ingin berkunjung tanpa dibatasi hari tertentu.

Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, museum menyediakan fasilitas berupa meja panjang beserta bangku yang dapat digunakan pengunjung untuk membaca koleksi buku, serta ruangan khusus yang disediakan bagi tamu yang berkunjung ke museum.

Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun museum ini dikelola secara sederhana, pengelola tetap berupaya memberikan kenyamanan bagi pengunjung selama berada di museum. Meja dan bangku yang disediakan tidak hanya berfungsi sebagai

tempat membaca, tetapi juga menjadi sarana bagi pengunjung untuk berdiskusi maupun berdiam sejenak sambil mengamati koleksi yang terpajang di sekitar ruangan.



Gambar 4.4 Meja dan Kursi Baca di Ruang Utama Museum Jenderal Abdul Haris Nasution



Gambar 4.5 Kursi Tamu di Museum Jenderal Abdul Haris Nasution

d. Koleksi Museum

Koleksi yang tersimpan di Museum Jenderal Abdul Haris Nasution terdiri atas rumah kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution terletak tepat di samping Museum Jenderal Abdul Haris Nasution,

sehingga keduanya membentuk kawasan cagar budaya yang saling melengkapi dan berbagai jenis foto dan buku yang berkaitan dengan kehidupan dan perjuangan Jenderal Abdul Haris Nasution.

Koleksi foto meliputi foto keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution, foto semasa muda, foto kedua orang tua, serta foto-foto yang menggambarkan masa perjuangan beliau. Selain koleksi foto, museum juga menyimpan berbagai buku, baik yang secara khusus membahas riwayat hidup dan perjuangan Jenderal Abdul Haris Nasution, maupun buku-buku umum lainnya yang melengkapi koleksi museum sebagai sarana literasi bagi masyarakat.

Koleksi foto yang tersimpan di museum memiliki nilai penting sebagai bukti visual perjalanan hidup Jenderal Abdul Haris Nasution, mulai dari masa kecil hingga masa perjuangannya, sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung sisi historis sekaligus sisi personal dari tokoh tersebut. Demikian pula dengan koleksi buku yang tersedia, keberadaannya turut mendukung fungsi museum sebagai sarana literasi, tidak hanya bagi pelajar dan peneliti yang ingin mengetahui riwayat Jenderal Abdul Haris Nasution secara lebih mendalam, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan melalui bacaan yang tersedia di museum.

Selain koleksi foto dan buku, museum juga menyimpan catatan tulisan tangan Jenderal Abdul Haris Nasution yang tertulis di atas lembaran-lembaran kertas berukuran kecil. Keberadaan catatan tulisan tangan tersebut menambah nilai historis koleksi museum, karena memberikan gambaran langsung mengenai pemikiran maupun catatan pribadi tokoh tersebut yang tidak diperoleh dari sumber lain.

Berdasarkan hasil observasi, museum telah memiliki katalog buku tertulis yang disusun secara terkategori, meskipun masih dalam bentuk manual dan belum terkomputerisasi. Katalog tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Kategori pertama adalah buku-buku karangan Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri, tercatat

hingga nomor 74, di antaranya berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan (11 jilid), Memenuhi Panggilan Tugas (9 jilid), Mengawal Nurani Bangsa (3 jilid), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) (3 jilid).

Kategori kedua adalah buku-buku yang ditulis oleh penulis lain mengenai Jenderal Abdul Haris Nasution, tercatat sebanyak 23 judul, di antaranya Dua Jenderal Besar Bicara Tentang Gestapu/PKI, Legitimizing Military Rule Indonesian Armed Forces Ideology 1958-2000, dan Abdul Haris Nasution: A Political Biography. Selain itu, terdapat pula sejumlah buku terkait yang disusun secara terpisah, seperti A.H. Nasution: Prajurit, Pejuang dan Pemikir karangan Solichin Salam, serta Biografi Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution "Perjalanan Hidup dan Pengabdianya" yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat pada tahun 2009.

Kategori ketiga adalah koleksi buku umum yang tidak berkaitan langsung dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, tercatat lebih dari 120 judul, sebagian besar bertemakan keislaman dan pengembangan diri. Keberadaan katalog yang terkategori ini menunjukkan bahwa pengelola telah melakukan upaya pencatatan koleksi secara tertulis, meskipun pencatatan tersebut belum mencakup informasi mengenai jumlah eksemplar secara pasti maupun kondisi fisik masing-masing buku.

e. Visi dan Misi Museum

Museum ini sendiri tidak memiliki visi dan misi yang resmi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku penjaga museum, visi dan misi tersebut sebelumnya pernah disampaikan secara lisan oleh Bapak Sahruli Nasution selaku ketua pengurus museum kepada Bapak Yusuf, yang kemudian disampaikan pula oleh Bapak Yusuf kepada peneliti. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:

Visi:

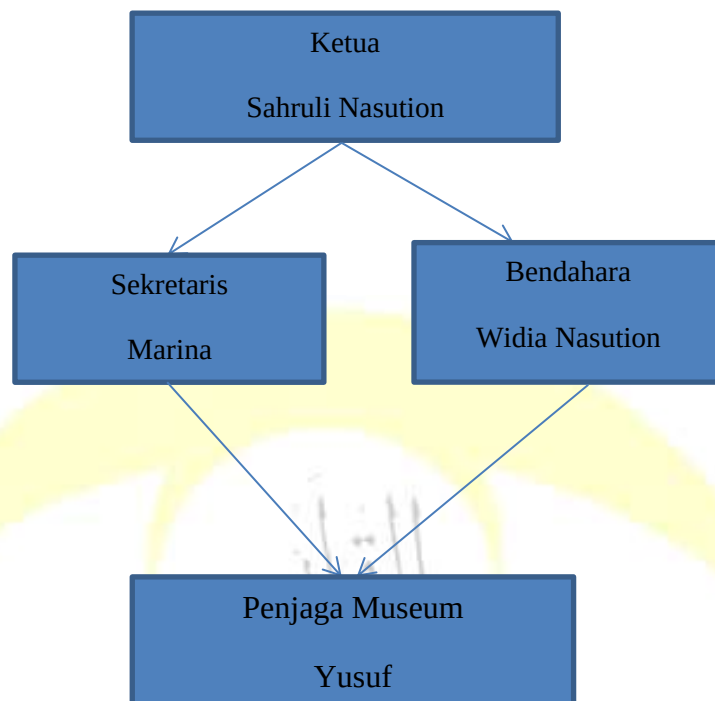
Menjadikan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai wadah pelestarian nama besar dan jasa Jenderal Abdul Haris Nasution, sekaligus sebagai destinasi wisata sejarah yang mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Misi:

1. Melestarikan dan menjaga nama besar serta jasa Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai putra daerah Kotanopan bagi generasi mendatang.
2. Mengembangkan museum sebagai destinasi wisata sejarah yang dikenal luas oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah.
3. Memberdayakan masyarakat sekitar melalui potensi wisata sejarah yang dimiliki desa.

2. Temuan Khusus Penelitian**a. Penerapan Fungsi Pengorganisasian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Museum****1) Penerapan Fungsi Pengorganisasian**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, pengelolaan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution memiliki struktur kepengurusan meskipun sifatnya belum resmi atau berbadan hukum formal. Struktur pengelolaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan Struktur Pengelola Museum Jenderal Abdul Haris Nasution

Tabel 4.1 Pengurus Museum Jenderal Abdul Haris Nasution

Jabatan	Nama
Ketua	Sahruli Nasution
Sekretaris	Marina
Bendahara	Widia Nasution
Penjaga Museum	Yusuf

Museum Jenderal Abdul Haris Nasution tidak memiliki struktur organisasi yang formal dan berjenjang seperti lembaga-lembaga pada umumnya. Museum ini dikelola dengan susunan kepengurusan sederhana yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara, serta dibantu oleh seorang penjaga museum yang bertugas merawat dan mengawasi museum sehari-hari. Kesederhanaan pengelolaan ini mencerminkan sistem kekeluargaan yang menjadi ciri khas museum ini, di mana pembagian tugas berjalan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antaranggota keluarga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui bahwa seluruh pengurus dan penjaga museum ini masih memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ketua pengurus, Sahruli Nasution, merupakan anak dari Hendrianti Sahara, sekaligus cucu dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Sekretaris, Marina, merupakan anak dari adik kandung Jenderal Abdul Haris Nasution. Bendahara, Widia Nasution, juga masih berasal dari garis keturunan keluarga yang sama. Adapun Yusuf, selaku penjaga museum, memiliki hubungan kekerabatan sebagai cucu dari saudara kandung Jenderal Abdul Haris Nasution.

Fakta ini semakin memperjelas bahwa pengorganisasian museum yang bersifat kekeluargaan bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan didasarkan pada ikatan darah dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari keluarga besar Jenderal Abdul Haris Nasution untuk turut menjaga dan melestarikan warisan sejarah leluhur mereka sendiri.

Pembagian tugas antara ketua, sekretaris, dan bendahara tidak didasarkan pada catatan atau bagan struktur resmi, melainkan hanya berdasarkan penunjukan secara lisan. Selain itu, ketiga pengurus tersebut juga berdomisili di luar Sumatera Utara, sehingga tidak dapat memantau kondisi museum secara langsung setiap hari.

Selain wawancara dengan Bapak Yusuf selaku penjaga museum, peneliti juga menghubungi Bapak Sahruli Nasution selaku ketua pengurus museum melalui sambungan telepon. Beliau menyampaikan hal berikut terkait penunjukan pengurus museum:

“Kami berempat, saya sebagai ketua, lalu sekretaris, bendahara dan penjaga museum yaitu bapak Yusuf, ditunjuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan keluarga, bukan lewat pemilihan resmi. Saya sendiri adalah anak dari Hendrianti Sahara, sehingga merupakan cucu dari Jenderal Abdul Haris Nasution, sedangkan sekretaris adalah anak dari adik Jenderal Abdul Haris Nasution, dan bendahara juga masih dari keturunan keluarga yang sama. Penunjukan itu didasarkan pada kepercayaan antaranggota keluarga, karena kami memang masih satu keturunan dengan

Jenderal Abdul Haris Nasution, jadi kami merasa punya tanggung jawab untuk ikut menjaga museum ini.” (Hasil wawancara dengan Sahruli Nasution, melalui telepon, Nomor Hp 08119503062, 09 Juli 2026).



Gambar 4.6 Ketua Museum Bapak Sahruli Nasution

Kondisi ini menjadikan Yusuf selaku penjaga museum sebagai pihak yang mengetahui secara langsung segala hal terkait museum, termasuk kebutuhan, kekurangan, maupun kerusakan yang terjadi, mengingat penjaga museum bertempat tinggal di dalam museum itu sendiri. Apabila terdapat hal yang perlu disampaikan kepada pengurus, penjaga museum yang akan menghubungi pengurus melalui telepon.

Meskipun struktur kepengurusan internal museum bersifat informal, secara kelembagaan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution telah tercatat resmi di Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal sebagai cagar budaya dan objek wisata resmi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pariwisata, Bapak Mukhtar Nasution, dalam wawancara yang dilakukan peneliti. Pengakuan resmi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sehari-hari berjalan secara kekeluargaan, namun status museum sebagai bagian dari aset cagar budaya daerah telah diakui secara administratif oleh pemerintah.

Keterlibatan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan museum bersifat tidak langsung, yaitu berupa kesediaan memberikan pendapat

atau arahan terkait penataan dan pengelolaan museum apabila pihak pengelola atau penjaga museum datang berkonsultasi ke Dinas Pariwisata. Menurut Bapak Mukhtar Nasution, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembinaan secara langsung dari Dinas Pariwisata kepada Museum Jenderal Abdul Haris Nasution.

Fungsi pengorganisasian pada dasarnya bertujuan untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Syahputra & Aslami, 2023). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian Museum Jenderal Abdul Haris Nasution belum sepenuhnya sesuai dengan konsep tersebut, karena pembagian tugas antara ketua, sekretaris, dan bendahara hanya didasarkan pada penunjukan secara lisan, tanpa catatan atau bagan struktur yang resmi.

Kondisi ini menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi, fleksibilitas yang muncul dari sistem kekeluargaan memudahkan koordinasi karena didasarkan pada rasa saling percaya antaranggota keluarga, sebagaimana ciri umum organisasi berbasis kekeluargaan yang mengandalkan hubungan personal dan kepercayaan sebagai dasar pengambilan keputusan (Fitria, 2024). Namun, apabila merujuk pada konsep struktur dan desain organisasi, pembagian tugas idealnya tetap disertai kejelasan uraian kerja (job description) agar setiap anggota memahami batas wewenang dan tanggung jawabnya secara pasti (Muslikhah, 2024). Di sisi lain, ketidakhadiran pengurus inti di lokasi museum akibat berdomisili di luar Sumatera Utara berpotensi memperlambat pengambilan keputusan apabila terjadi permasalahan mendesak, karena segala urusan harus terlebih dahulu dikomunikasikan melalui penjaga museum sebelum sampai kepada pengurus.

"Kalau ada hal-hal penting yang perlu disampaikan, misalnya kerusakan atau ada kejadian tertentu, saya biasanya langsung telepon ke ketua atau pengurus yang lain untuk menyampaikan dan meminta arahan, karena mereka semua tinggal di luar Sumatera Utara dan

tidak bisa datang langsung setiap saat." (Hasil wawancara dengan Yusuf, 13 Juli 2026).



4.7 Wawancara bersama Bapak Yusuf

Secara lebih rinci, pengorganisasian yang baik menurut Wardhana (2024) dapat dilihat dari tiga indikator utama, yaitu:

- a) Pembagian kerja
- b) Departementalisasi
- c) Pendelegasian wewenang

Berdasarkan temuan di lapangan, kondisi ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pembagian kerja: terpenuhi sebagian
- b) Departementalisasi: belum terpenuhi
- c) Pendelegasian wewenang: belum terpenuhi

Pembagian kerja telah terpenuhi sebagian, karena terdapat pembagian peran antara ketua, sekretaris, bendahara, dan penjaga museum, meskipun hanya berdasarkan penunjukan lisan. Departementalisasi belum terpenuhi, karena tidak terdapat pengelompokan tugas ke dalam unit atau bagian kerja yang tertulis. Pendelegasian wewenang juga belum terpenuhi, karena tidak ada pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara tertulis, sehingga seluruh operasional harian dibebankan kepada penjaga museum tanpa batas wewenang yang jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian museum ini berjalan bukan karena kekuatan struktur formal, melainkan karena kepercayaan dan ikatan kekeluargaan yang menggantikan fungsi pengawasan struktural. Temuan ini sekaligus menegaskan kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu, yang umumnya mengkaji museum dengan sistem kelembagaan yang sudah formal.

Temuan mengenai pengakuan resmi museum sebagai cagar budaya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal juga memperlihatkan adanya jarak antara pengelolaan internal yang bersifat kekeluargaan dengan status formal yang telah diberikan pemerintah. Kondisi ini menandakan bahwa pengakuan administratif dari pihak eksternal belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan tata kelola internal, sehingga pengorganisasian museum ke depannya perlu diarahkan agar sejalan dengan status formal yang telah dimilikinya.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar pengelola menyusun uraian kerja tertulis secara sederhana bagi setiap pengurus, serta menetapkan mekanisme koordinasi berkala antara pengurus dan penjaga museum, agar tanggung jawab pengelolaan tidak lagi bertumpu pada satu pihak saja.

2) Penerapan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap Museum Jenderal Abdul Haris Nasution memang ada dan tetap berjalan hingga saat ini, meskipun bersifat sederhana dan belum didukung oleh standar maupun mekanisme kontrol yang tertulis secara formal.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola adalah dengan memantau dan mencatat jumlah kunjungan ke museum setiap bulannya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pengunjung museum pada bulan Desember 2025 tercatat sebanyak 17 orang, kemudian meningkat menjadi 41 orang pada bulan Januari 2026, dan turun menjadi 20 orang pada bulan Februari 2026. Jumlah kunjungan

kembali meningkat signifikan pada bulan Maret 2026 dengan 83 orang, kemudian berturut-turut tercatat 38 orang pada bulan April, 54 orang pada bulan Mei, 48 orang pada bulan Juni, 30 orang pada bulan Juli, dan 48 orang pada bulan Agustus 2026.

Tabel 4.2 Data Kunjungan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution
Periode Desember 2025 – Agustus 2026

Bulan	Jumlah Pengunjung
Desember 2025	17 orang
Januari 2026	41 orang
Februari 2026	20 orang
Maret 2026	83 orang
April 2026	38 orang
Mei 2026	54 orang
Juni 2026	48 orang
Juli 2026	30 orang
Agustus 2026	48 orang

Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah pengunjung museum mengalami fluktuasi setiap bulannya, dengan jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 dan jumlah terendah pada bulan Desember 2025.

Berdasarkan data kunjungan selama sembilan bulan tersebut, total pengunjung yang tercatat sebanyak 379 orang, sehingga diperoleh rata-rata kunjungan sebesar 42 orang per bulan, atau sekitar 10 orang per minggu. Apabila rata-rata tersebut diproyeksikan dalam satu tahun, maka estimasi jumlah pengunjung museum mencapai sekitar 505 orang per tahun. Perhitungan ini bersifat estimasi berdasarkan data sembilan bulan yang tersedia dan dapat berubah sesuai dengan pola kunjungan aktual pada bulan-bulan berikutnya.

Fluktuasi jumlah pengunjung setiap bulannya menunjukkan bahwa pengelola melakukan pencatatan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap tingkat kunjungan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui pola kunjungan masyarakat terhadap museum dari waktu ke waktu.

Pengunjung yang datang ke museum tidak hanya bersifat perorangan, tetapi juga dalam bentuk rombongan yang berasal dari berbagai instansi, seperti sekolah (di antaranya MTs Negeri 5 Mandailing Natal), madrasah diniyah, panti asuhan, kelompok pengajian, hingga institusi kesehatan. Untuk kunjungan yang bersifat rombongan, pencatatan yang dilakukan pengelola tidak selalu mencantumkan nama setiap individu pengunjung, melainkan cukup mencatat nama instansi atau kelompok yang berkunjung.

Selain memantau jumlah kunjungan, pengelola juga melakukan pengawasan terhadap keberadaan koleksi buku di museum. Pengecekan dilakukan secara rutin satu kali dalam sebulan, yaitu setiap hari Sabtu, untuk memastikan tidak ada buku koleksi yang hilang atau berkurang jumlahnya. Pada kesempatan yang sama, pengelola turut memeriksa kondisi ruangan museum, termasuk kebersihan dan kelembapan ruangan, guna menjaga koleksi tetap dalam keadaan baik dan terawat.

Kebijakan pengawasan ini diperketat setelah terjadinya kasus hilangnya buku koleksi yang sebelumnya dipinjamkan kepada pengunjung. Sejak kejadian tersebut, pengelola tidak lagi memperbolehkan buku koleksi dibawa pulang atau dipinjamkan kepada pengunjung. Pengunjung yang ingin membaca koleksi buku hanya diperbolehkan membacanya di area museum, dan pengelola turut mengawasi secara langsung selama proses membaca berlangsung untuk menjaga keamanan dan keutuhan koleksi.

Bentuk pengawasan lainnya dilakukan terhadap pelayanan kepada pengunjung yang datang ke museum. Pengurus museum secara langsung mengamati dan memantau setiap pengunjung, serta menanyakan kebutuhan atau hal yang ingin dicari oleh pengunjung selama berada di museum. Melalui interaksi ini, pengurus dapat memastikan pengunjung terlayani dengan baik sekaligus tetap mengawasi aktivitas mereka di dalam museum.

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan museum bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan dan koleksi terjaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Helmi, 2019). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di Museum Jenderal Abdul Haris Nasution telah dilakukan secara konsisten, meliputi pencatatan jumlah pengunjung setiap bulan, pengecekan koleksi buku dan kondisi ruangan setiap hari Sabtu, serta pemantauan langsung terhadap pengunjung yang datang.

Secara lebih rinci, pengawasan yang baik menurut Aswaruddin dkk. (2024) dapat dilihat dari tiga indikator utama, yaitu:

- a) Penentuan standar
- b) Evaluasi unjuk kerja
- c) Tindakan perbaikan

Berdasarkan temuan di lapangan, kondisi ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penentuan standar: belum terpenuhi
- b) Evaluasi unjuk kerja: terpenuhi sebagian
- c) Tindakan perbaikan: terpenuhi

Penentuan standar belum terpenuhi, karena tidak terdapat standar tertulis mengenai jumlah maupun kondisi ideal koleksi. Evaluasi unjuk kerja telah terpenuhi sebagian, karena pengelola secara rutin mencatat jumlah kunjungan dan memiliki katalog buku, meskipun masih dilakukan secara manual. Tindakan perbaikan telah terpenuhi, yang dapat dilihat dari kebijakan larangan meminjamkan koleksi buku yang diberlakukan setelah terjadinya kasus kehilangan buku.

Meskipun demikian, seluruh proses pengawasan tersebut bertumpu hanya pada satu orang, yaitu penjaga museum. Kondisi serupa juga ditemukan pada penelitian Juairiah (2022), yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan museum. Fenomena

ketergantungan pada satu aktor utama akibat keterbatasan sumber daya manusia ini turut ditemukan pada museum berbasis komunitas lain di Indonesia, sehingga bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan tantangan umum yang dihadapi museum-museum kecil dengan sumber daya terbatas (Adiati & Tjahjono, 2025). Kasus hilangnya buku koleksi yang pernah terjadi menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan yang bertumpu pada satu individu memiliki celah, terutama apabila penjaga berhalangan hadir atau tidak dapat mengawasi seluruh area secara bersamaan.

Oleh karena itu, meskipun pengawasan yang diterapkan saat ini sudah berjalan dan cukup membantu menjaga koleksi, akan lebih baik apabila ke depannya melibatkan lebih dari satu pihak dalam proses pengawasan harian, sehingga risiko kehilangan atau kerusakan koleksi dapat diminimalkan.

Pengawasan yang baik menurut teori manajemen museum idealnya didukung oleh pencatatan koleksi yang sistematis dan mudah ditelusuri (Helmi, 2019). Pada museum ini, pengelola sebenarnya telah memiliki katalog buku tertulis yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu karangan Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri, buku tentang beliau yang ditulis pihak lain, serta buku umum. Namun, letak ketidaksesuaian dengan konsep pengawasan yang ideal terletak pada bentuk katalog yang masih manual dan belum mencantumkan jumlah eksemplar maupun kondisi fisik setiap koleksi secara rinci, sehingga sulit digunakan untuk mendeteksi kehilangan atau kerusakan koleksi secara cepat. Saran yang dapat diberikan adalah agar katalog tersebut dilengkapi dengan data jumlah eksemplar dan kondisi fisik setiap koleksi, serta apabila memungkinkan, mulai dialihkan ke bentuk digital sederhana agar lebih mudah diperbarui dan ditelusuri oleh pengelola.

“Saya sendiri yang menjaga dan mengurus museum ini setiap hari, karena pengurus yang lain seperti ketua, sekretaris, dan bendahara tinggal di luar Sumatera Utara. Selama ini belum ada

bagian atau catatan resmi siapa mengerjakan apa, jadi kami jalan berdasarkan kesepakatan bersama saja. Kalau soal pengawasan, saya usahakan setiap hari Sabtu saya cek koleksi buku dan kondisi ruangan, saya catat juga pengunjung setiap hari supaya ada datanya.” (Hasil wawancara dengan Yusuf, 16 Juli 2026).



Gambar 4.8 Wawancara bersama Bapak Yusuf

b. Strategi Pengelola dalam Menghadapi Keterbatasan Pengorganisasian dan Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, Salah satu strategi yang diterapkan penjaga museum dalam menghadapi keterbatasan koleksi akibat kendala dana adalah dengan menyampaikan penjelasan secara baik kepada pengunjung. Ketika pengunjung menanyakan buku atau koleksi tertentu yang belum tersedia di museum, penjaga museum menjelaskan dengan sikap yang ramah dan sopan bahwa ketiadaan koleksi tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki.

Strategi tersebut menunjukkan upaya pengelola untuk tetap menjaga kenyamanan dan kepuasan pengunjung meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Dengan memberikan penjelasan yang jujur dan disampaikan secara baik, pengunjung dapat memahami kondisi museum tanpa menimbulkan kesan pelayanan yang buruk, sehingga citra museum sebagai sarana edukasi dan literasi tetap terjaga di mata masyarakat.

Strategi komunikasi tersebut sejalan dengan pentingnya komunikasi pelayanan yang efektif dalam menjaga kepuasan pengunjung museum (Rosawati & Pratama, 2025).

Strategi komunikasi yang bersifat personal dan terbuka semacam ini penting diterapkan mengingat skala museum yang masih kecil dan sumber daya yang terbatas, sehingga membangun kepercayaan pengunjung melalui interaksi langsung menjadi salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan minat masyarakat berkunjung, meskipun museum belum memiliki fasilitas maupun koleksi yang selengkap museum-museum besar pada umumnya.

“Kalau ada pengunjung yang tanya buku tertentu yang belum ada di museum ini, saya jelaskan baik-baik bahwa buku itu belum ada karena dana kami memang terbatas. Saya usahakan ramah supaya pengunjung nyaman dan tidak kecewa, walaupun koleksi kami belum selengkap museum-museum besar.” (Hasil wawancara dengan Yusuf, 25 Juli 2026).



Gambar 4.9 Wawancara bersama Bapak Yusuf

Berdasarkan temuan penelitian, dari dua fungsi manajemen yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu pengorganisasian dan pengawasan, fungsi pengawasan merupakan yang paling berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengunjung saat ini, karena mencakup pemantauan dan pencatatan kunjungan yang berjalan rutin, yang

ditunjang pula oleh promosi dari Dinas Pariwisata. Namun demikian, apabila fungsi pengorganisasian diperkuat, misalnya dengan menambahkan struktur atau peran khusus di bidang promosi, maka potensi peningkatan pengunjung ke depannya dapat lebih optimal, karena kegiatan promosi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak eksternal.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan pengorganisasian dan pengawasan tersebut adalah penguatan fungsi pengorganisasian melalui penyusunan struktur organisasi secara tertulis serta penambahan peran khusus di bidang promosi, sehingga pembagian tugas menjadi lebih jelas dan kegiatan promosi museum dapat dikelola secara internal, tidak hanya bergantung pada dukungan Dinas Pariwisata.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengorganisasian dan Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan, penjaga museum menyatakan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat kendala dalam mengurus museum, kecuali persoalan keterbatasan dana. Pernyataan ini menegaskan bahwa di antara berbagai aspek pengelolaan museum, keterbatasan dana merupakan satu-satunya kendala utama yang dirasakan langsung oleh pihak yang menjalankan operasional museum sehari-hari.

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan museum adalah keterbatasan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga museum, tidak terdapat anggaran rutin yang dialokasikan setiap tahun atau setiap dua tahun untuk pemeliharaan museum. Dana untuk keperluan renovasi, yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp5.000.000,00 apabila terjadi kerusakan, dikumpulkan secara mandiri oleh pihak keluarga hanya pada saat renovasi tersebut benar-benar diperlukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan finansial keluarga dalam menyediakan dana secara berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan museum masih sangat bergantung pada swadaya keluarga, tanpa dukungan anggaran tetap dari pihak luar maupun pemerintah, sehingga menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan perawatan dan pengembangan museum ke depannya.

Salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan museum adalah adanya partisipasi dari pengunjung maupun masyarakat yang ingin menyumbangkan buku atau barang lain untuk melengkapi koleksi museum. Pengurus museum menerima sumbangan tersebut dengan senang hati, karena dapat membantu menambah dan memperkaya koleksi museum di tengah keterbatasan dana yang dimiliki.

Adanya partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan museum masih bergantung pada swadaya keluarga, terdapat dukungan dari pihak luar berupa kepedulian pengunjung terhadap keberlangsungan museum, yang turut membantu meringankan keterbatasan sumber daya yang dihadapi pengelola.

Selain dari sumbangan pengunjung, koleksi buku museum juga diperoleh dari Museum Jenderal Abdul Haris Nasution yang berada di Jakarta, yang memiliki koleksi lebih lengkap mengingat statusnya sebagai museum utama yang mendokumentasikan perjalanan hidup dan karier Jenderal Abdul Haris Nasution secara nasional. Dukungan dari museum di Jakarta ini turut membantu melengkapi koleksi Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Kecamatan Kotanopan, di tengah keterbatasan dana yang dimiliki pengelola setempat.

Selain sumbangan berupa buku, pengunjung juga terkadang memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Sumbangan tersebut biasanya digunakan oleh pengelola untuk keperluan perbaikan fasilitas museum, seperti perbaikan lampu dan kebutuhan pemeliharaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pengunjung tidak hanya berperan dalam melengkapi koleksi, tetapi juga turut membantu

menjaga kondisi fisik museum agar tetap layak dan nyaman dikunjungi.

Selain dukungan dari pengunjung dan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta, faktor pendukung lainnya berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, meskipun tidak dalam bentuk bantuan dana. Menurut Bapak Mukhtar Nasution, Dinas Pariwisata berperan memperkenalkan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution kepada masyarakat melalui promosi wisata, yang secara umum terbagi menjadi tiga kategori, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Melalui promosi tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan mengenal keberadaan museum sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Mandailing Natal.

Selain dukungan dari pengunjung dan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta, sebagian koleksi buku di museum ini juga berasal dari Dinas Perpustakaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mukhtar Nasution selaku Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal dalam wawancara yang dilakukan peneliti. Dukungan tersebut turut memperkuat fungsi museum sebagai Rumah Literasi, sebagaimana tercantum dalam papan nama museum yang menyebutkan keterlibatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Untuk ke depannya, Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Kecamatan Kotanopan termasuk dalam program pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal, di bawah pimpinan Kabid baru, yaitu Bapak Mukhtar Nasution, yang baru menjabat selama kurang lebih tiga bulan. Sebagai langkah awal, Dinas Pariwisata berencana untuk terlebih dahulu meneliti dan meninjau langsung lokasi museum guna menentukan strategi yang tepat dalam mengembangkan museum tersebut.

Terkait hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Mukhtar Nasution selaku Kepala Bidang

Destinasi dan Industri Wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Kotanopan memang sudah tercatat resmi di Dinas Pariwisata sebagai cagar budaya. Tapi kalau soal keterlibatan kami secara langsung, sejauh ini belum ada pembinaan rutin dari dinas ke museum tersebut. Kami memang belum pernah memberikan bantuan dana, tapi kami bantu memperkenalkan museum ini lewat promosi wisata, dan setahu saya Dinas Perpustakaan juga pernah membantu. Saya sendiri baru sekitar tiga bulan menjabat sebagai Kabid di sini, jadi untuk museum ini, langkah awal kami adalah turun langsung dulu untuk meninjau kondisinya, baru nanti kami pertimbangkan untuk memasukkannya secara resmi ke program pengembangan wisata sejarah kabupaten.” (Hasil wawancara dengan Mukhtar Nasution, 10 Agustus 2026).



Gambar 4.10 Wawancara bersama Bapak Mukhtar Nasution sebagai Kepala Bidang Dinas Pariwisata

Selain keterbatasan dana, museum ini juga belum memiliki tenaga profesional khusus seperti register, kurator, konservator, preparator, dan edukator sebagaimana idealnya standar pengelolaan koleksi museum yang baik (Sucilawati & Sujana, 2024), sehingga seluruh tugas pengelolaan koleksi masih ditangani langsung oleh penjaga museum.

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang membantu keberlangsungan museum, yaitu partisipasi pengunjung yang menyumbangkan buku maupun uang untuk perbaikan fasilitas, serta dukungan koleksi dari Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta. Faktor-faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan museum ini masih sangat bergantung pada kepedulian pihak eksternal, baik individu maupun institusi sejenis. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata, agar pengelolaan museum ke depannya tidak hanya mengandalkan swadaya semata (Utama, 2024).

“Sejauh ini kendala kami cuma satu, yaitu dana. Tidak ada anggaran rutin untuk perawatan museum, kalau ada kerusakan ya kami kumpulkan sendiri dari keluarga, bisa sampai lima juta untuk renovasi kerusakan. Kalau ada pengunjung yang mau menyumbang buku, itu sangat membantu menambah koleksi, saya terima dengan senang hati.” (Hasil wawancara dengan Yusuf, 08 Agustus 2026).



Gambar 4.11 Wawancara bersama Wawancara bersama Bapak Yusuf

Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa keterbatasan dana merupakan faktor penghambat utama yang dirasakan langsung oleh pengelola dalam kesehariannya. Di sisi lain, berbagai faktor pendukung yang telah diuraikan sebelumnya, baik partisipasi

pengunjung, dukungan koleksi dari Museum Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta, maupun kerja sama dengan Dinas Perpustakaan, menjadi penopang penting yang memungkinkan museum ini tetap bertahan dan terus berupaya berkembang di tengah keterbatasan yang dihadapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan Museum Jenderal Abdul Haris Nasution hingga saat ini tidak lepas dari kombinasi antara keterbatasan sumber daya internal dan dukungan berbagai pihak eksternal yang secara bertahap turut membantu mengatasi hambatan tersebut.

